



Pemda Kabupaten Manggarai Barat

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2026

kominfo@manggaraibaratkab.go.id



<https://kominfo.manggaraibaratkab.go.id>



KATA PENGANTAR

Nomor : 500.12-55/Dinkominfo/II/2025

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026. Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Dokumen ini merupakan pedoman Perencanaan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Renstra dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat yang tertuang dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026. Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat digunakan sebagai acuan perencanaan perangkat daerah oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dan bahan evaluasi demi peningkatan kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun mendatang khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada umumnya.

Labuan Bajo, 10 Februari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat,



Paulus Setahu, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 196806292000121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBARiv

BAB I 1

 I.1. Latar Belakang 1

 I.2. Landasan Hukum 5

 I.3. Maksud dan Tujuan 7

 I.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II9

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2021 -2026. 9

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28

 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat 33

 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 40

 3.1. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 50

BAB III51

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 51

 3.1.1. Arah Kebijakan Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika 51

 3.1.2. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika..... 53

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 54

BAB IV58

 4.1. Program Dan Kegiatan 58

BAB V 82

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika s/d tahun 2024 20

Tabel 2. 2 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat 2016-2021 299

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat 31

Tabel 2. 4 Nama ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 344

Tabel 2. 5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 41

Tabel 3. 1 Identifikasi Kebijakan Nasional 51

Tabel 3. 2 Misi, Tujuan dan Sasaran 56

Tabel 3. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika 56

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Prakiraan Maju Tahun 2027 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan 3

Gambar 2. 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat 36

**BAB I
PENDAHULUAN****I.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rancangan awal rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) renja perangkat daerah, dalam proses penyusunannya perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan lainnya.

Rancangan Awal Rencana Kerja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

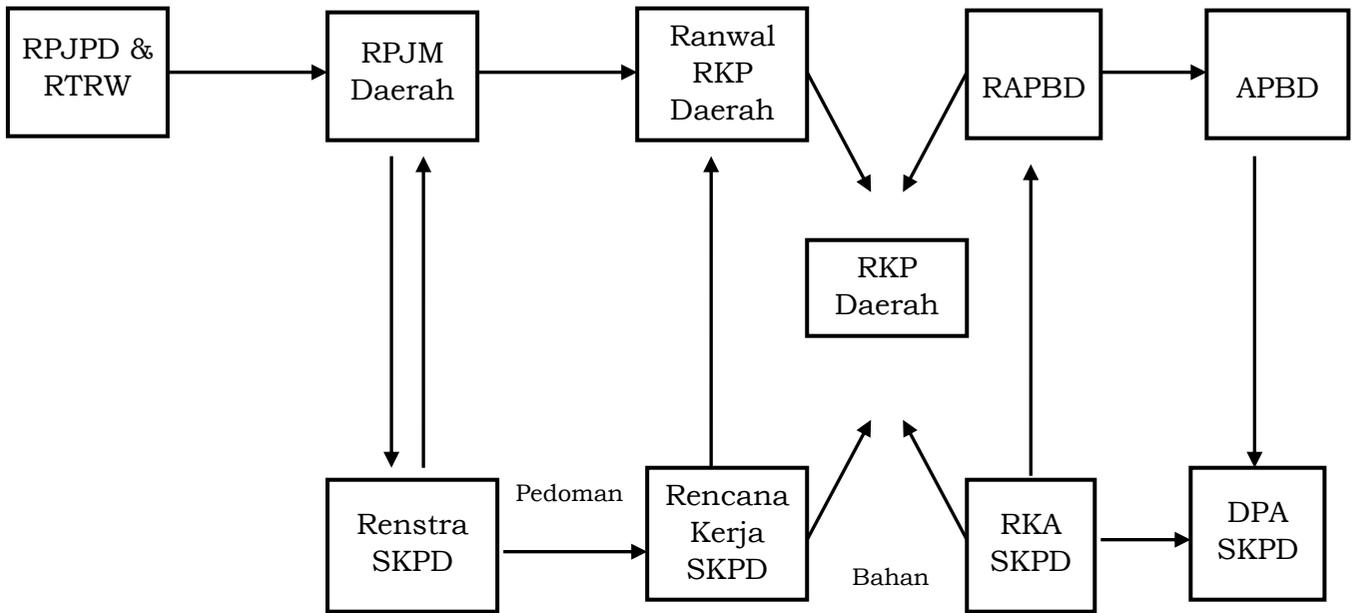
- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 I-2 Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Rancangan Awal Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat. Pada gambar 1.1. Dibawah ini kami sajikan alur keterkaitan antar dokumen perencanaan.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Gambar 1. 1 Alur Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program kegiatan pada urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian yang meliputi Bidang Tata Kelola Aplikasi Informatika; Bidang Data dan Statistik Sektorial; dan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta melaksanakan ketatausahaan dinas, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor: 75 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah serta program yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah dan rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Manggarai Barat sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD 2026;
2. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Ranwal Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Ranwal Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
5. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang data dan statistik sektoral dan bidang persandian berkewajiban juga menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026. Secara garis besar urutan tahapan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan review RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan;

2. Melakukan review rancangan awal Perangkat Daerah adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi prioritas program dan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah;
3. Melakukan review dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan mana yang belum optimal dan perlu dilakukan perubahan, dikembangkan atau dihentikan baik di tingkat kebijakan ataupun operasional;
4. Merumuskan tujuan, kebijakan dan sasaran, Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026;
5. Merumuskan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan;
6. Merumuskan usulan pagu indikatif dan prakiraan maju;
7. Menyusun dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;
8. Melakukan review hasil Musrenbang;
9. Membahas rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Forum Perangkat Daerah;
10. Menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Musrenbang.

Dengan demikian diharapkan penyusunan Ranwal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 ini dapat menentukan rencana arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global. Selanjutnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2026, dan akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

- dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026;
 16. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor: 75 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Manggarai Barat.
 17. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

I.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 adalah sebagai dokumen awal Perencanaan Pembangunan yang dapat memberikan arahan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dalam Pelayanan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, data dan statistik sektoral dan keamanan informasi (Persandian) Kabupaten Manggarai Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
- b. Tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, di dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Ranwal Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. Dokumen Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 ini disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**BAB V. PENUTUP**

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2021 -2026.**

Untuk mempertanggungjawabkan atas penyelenggaraan anggaran dan rencana kerja tahun anggaran 2024 yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah dimuat dalam dokumen Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Untuk meningkatkan kualitas penyusunan rencana kerja tahun sebelumnya agar menjadi lebih baik, efektif dan akuntabel, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan perbaikan. Penilaian ini sangat penting dan menjadi masukan data untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 yang meliputi :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dan;
6. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2024 dapat disimpulkan secara umum bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan dengan baik dan telah memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan. Lebih lanjut, jika dilihat dari aspek serapan/realisasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran penggunaan biaya yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk mencapai sasaran strategis 2024 dianggarkan sebesar Rp. 4.440.171.033,- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.440.171.033,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 0,- dan terealisasi sebesar Rp.

4.119.317.778,- atau 92,77%. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024, maka perlu adanya gambaran kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti yang dijabarkan sebagai berikut :

2.1.1. Realisasi program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adanya efisiensi Perubahan Anggaran pada APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 untuk menutupi pendapatan asli daerah yang lambat dalam mencapai realisasi berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika, termasuk tingkat capaian kerjanya. Ada beberapa program/kegiatan yang capaian kerjanya tidak memenuhi target. Realisasi program tahun 2024 yaitu:

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

➤ Kegiatan Pengelolaan E-Government Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas: Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen dari target 2 Dokumen atau dengan capaian kinerja sebesar 50,00% dan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.387.300,- dan realisasi sebesar Rp. 361.600,- atau 1,87 %.

2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

➤ Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data: capaian kinerja sub kegiatan ini adalah 2 dokumen hasil pengumpulan, pengolahan dan analisa dari target 3 Dokumen atau dengan persentase capaian kinerja 66,67%, sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 27.021.500,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 30.248.400,- atau persentase tingkat penyerapannya adalah 89,33%.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada bahasan diatas telah dijelaskan bahwa adanya efisiensi anggaran APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 berimplikasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat, kendatipun demikian, efisiensi anggaran tidak sepenuhnya berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, sehingga capaian kinerja

yang diharapkan telah memenuhi target yang ditetapkan, adapun program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 150 %. Hasil yang dicapai adalah 9 Dokumen perencanaan dari target 6 Dokumen. Laporan tersebut antara lain : Renja Perubahan 2024, DPA 2024, DPA Pergeseran 2024, DPPA 2024, RKA Perubahan 2024, Rencana Aksi 2024, Cascading Kinerja 2024, Renja 2025, dan RKA 2025. Anggaran tersedia Rp 9.900.000,- dan realisasi Rp. 9.587.200,- dengan capaian penyerapan anggaran 96,84 %.
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100 %. Hasil yang dicapai adalah 7 Laporan dari target 7 Laporan. Laporan tersebut antara lain: Lakip 2024, LKPJ 2024, LPPD 2024, Evaluasi RKPD Triwulan I-IV, dan untuk alokasi Anggaran adalah sebesar Rp 3.096.600,- dengan realisasi Rp. 150.000,- dengan persentase penyerapan anggaran 4,84 %.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100 %. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah 14 dokumen pencairan gaji ASN dari target 14 dokumen selama 12 bulan termasuk gaji 13 dan gaji THR. Anggaran yang tersedia pada sub kegiatan adalah sebesar Rp. 2.219.886.373,- dan realisasi Rp. 2.111.661.714,- dengan persentase capaian penyerapan anggaran 95,12%;
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100 %. Hasil yang dicapai adalah 12 dokumen pembayaran honorarium pejabat pengelola keuangan dan gaji tenaga kontrak daerah selama 12 bulan dari target 12 dokumen. Anggaran tersedia adalah Rp. 191.742.460,- dan realisasi Rp. 170.054.085,- dengan persentase penyerapan 88,69%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah 120 %. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah 18 Dokumen Laporan Keuangan 2024 dari target 15

dokumen, yang mana laporan yang dimaksud adalah Laporan BO bulan Januari s/d Desember dan LRA Triwulan I s/d Triwulan IV. Anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 2.509.300,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.370.200,- atau persentase penyerapan sebesar 54,60%

c) Kegaitan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD: Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100 %. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah 1 dokumen laporan aset tetap dari target 1 dokumen. Adapun Anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp. 19.367.400,- dan realisasi Rp. 19.066.000,- dengan persentase penyerapan anggaran 98,44%.

d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi: Capaian kinerja kegiatan ini melebihi target yaitu mencapai 333,33 %, dimana Hasil yang dicapai adalah 10 orang pegawai pendidikan dan pelatihan TIK dari target 3 orang. Pencapaian yang melebihi target karena pendidikan dan pelatihannya banyak dilakukan secara daring. Adapun Anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 575.600,- dan realisasi Rp. 0,00,- dengan persentase penyerapan anggaran 0,00 %.

e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100 %. Hasil yang dicapai adalah presentase Pemenuhan Komponen instalasi listrik. Anggaran tersedia Rp. 8.183.400,- dan realisasi Rp. 6.781.000,- dengan persentase penyerapan anggaran 82,86%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100 %. Hasil yang dicapai adalah presentase pemenuhan alat tulis kantor. Anggaran tersedia Rp. 20.021.700,- dan realisasi Rp. 14.685.700,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 73.35%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100 %. Hasil yang dicapai adalah presentase pemenuhan makanan dan minuman kantor. Anggaran tersedia Rp. 24.059.700,- dan realisasi Rp.

5.250.000,- dengan persentase penyerapan anggaran adalah sebesar 21,82%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan: Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100 %. Hasil yang dicapai adalah prosentase pemenuhan barang cetak dan penggandaan. Anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 20.090.200,- dan realisasi Rp. 7.562.500,- dengan capaian penyerapan anggaran 37,64% Sub kegiatan ini mengalami penyerapan anggaran tidak mencapai 100 %, hal ini dikarenakan ijin pengajuan GU (ganti uang) oleh BPKD yang terlambat, sehingga mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material: Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100 %. Hasil yang dicapai adalah cakupan waktu pemenuhan penyediaan peralatan kebersihan kantor selama 12 bulan. Anggaran tersedia Rp. 9.921.000,- dan realisasi Rp. 4.341.500,- dengan capaian penyerapan anggaran 43,76%.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100 %. Hasil yang dicapai adalah prosentase rapat konsultasi dan koordinasi SKPD terfasilitasi. Anggaran yang tersedia Rp. 76.068.300,- dan realisasi Rp. 73.000.200,- dengan persentase capaian penyerapan anggaran 95,97%
- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD: Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100% dari target. Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen penatausahaan arsip kantor selama 1 tahun. Sedangkan anggaran yang untuk pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.097.200,- dengan realisasi Rp. 4.800.000,- atau persentase capaian penyerapan anggaran 94,17%.

f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100 %. Dimana Hasil yang dicapai adalah prosentase layanan surat menyurat. Anggaran tersedia Rp. 5.492.000,- dan realisasi Rp. 3.048.500,- dengan persentase penyerapan anggaran 55,51%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100 %. Hasil yang dicapai adalah cakupan waktu pelayanan

komunikasi, sumber daya air dan listrik yaitu selama 12 bulan. Anggaran yang tersedia Rp. 39.000.000,- dan realisasi Rp. 15.726.200,- dengan persentase capaian penyerapan anggaran 40,32%.

g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 85,71%. Hasil yang dicapai adalah prosentase terfasilitasi 12 Unit kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, serta dilengkapi dengan plat nomor dari target 14 Unit. Anggaran yang tersedia Rp. 55.500.000,- dan realisasi Rp. 42.137.450,- dengan persentase capaian penyerapan anggaran 75,92%.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100 %. Hasil yang dicapai 19 Unit peralatan mesin lainnya dipelihara. Peralatan itu antara lain AC, Personal Komputer, Laptop dan Printer. Anggaran tersedia Rp. 14.400.000,- dan realisasi Rp. 5.990.000,- dengan persentase capaian penyerapan anggaran 41,60%.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

a) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik: capaian kinerja sub kegiatan ini adalah 2 dokumen monitoring opini dan aspirasi publik dari target 2 dokumen dengan persentase capaian 100%. Adapun jumlah anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp. 8.820.000,- dan realisasi Rp. 8.473.500,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,07%.
- Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik: Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100%. Meskipun anggarannya dilakukan *refocusing* pada APBD Perubahan namun pekerjaannya tetap dilaksanakan seperti melakukan peliputan berita, pembuatan konten media sosial Pemda dan lain sebagainya. Hasil yang dicapai adalah 1 dokumen dari target 1 dokumen. Anggaran tersedia adalah sebesar Rp. 38.936.800,- dan realisasi Rp. 29.164.900,- dengan persentase capaian penyerapan anggaran 74,90%.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas: Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100%. Hasil yang dicapai adalah 1 dokumen laporan kegiatan kehumasan Pemda selama 1 tahun. Anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 72.032.800,- dan realisasi Rp. 65.649.050,- dengan persentase penyerapan anggaran 91,14%

3. Program Aplikasi Informatika

a) Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100%. Hasil yang dicapai adalah 1 dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran tersedia Rp. 1.379.462.900,- dan realisasi Rp. 1.353.157.034,- dengan persentase capaian penyerapan anggaran 98,09%.
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100%. Hasil yang dicapai adalah 1 unit Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola. Anggaran tersedia Rp. 39.935.200,- dan realisasi Rp. 38.000.000,- dengan persentase capaian penyerapan anggaran 95,15%.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah: Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100 %. Hasil yang dicapai adalah 1 dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah. Anggaran yang tersedia Rp. 48.000.000,- dan realisasi Rp. 33.092.945,- dengan persentase capaian penyerapan anggaran 68,94%.
- Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 250 %. Hasil yang dicapai adalah 5 Aplikasi SPBE yang online dan terintegrasi, antara lain aplikasi umum: jdih, satudata aplikasi administrasi: kolaborasi untuk SPBE, open data, dashboard terintegrasi dari target 2 aplikasi. Anggaran tersedia Rp. 51.050.000,- dan realisasi Rp. 48.750.000,- dengan persentase capaian penyerapan anggaran 95,49%.

- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE: Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100 %. Hasil yang dicapai adalah 1 (satu) dokumen monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE yang dilakukan secara mandiri, sedangkan dokumen hasil monitoring evaluasi SPBE menanti keputusan Menteri PAN RB. Anggaran tersedia Rp. 27.066.900,- dan realisasi Rp. 27.003.750,- dengan capaian penyerapan anggaran 99,77%.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah: Capaian Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 layanan dari target 1 layanan yang terhubung dengan sisten penghubung layanan pemerintah. Sub Kegiatan ini pada anggaran induk dianggarkan sebesar Rp 10.081.700,- namun pada APBD Perubahan dirasionalisasi menjadi Rp. 0,00.
- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas: Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah 1 dokumen dari target 2 dokumen atau 50%. Namun penyerapan anggarannya hanya 1,87% dari pagu anggaran sebesar Rp. 19.387.300. dan realisasi Rp. 361.600,- Hal ini terjadi karena pembatasan pembayaran pengadaan teknis oleh Badan Keuangan Daerah.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 66,67%. Hasil yang dicapai adalah 2 dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dari target 3 dokumen. Dokumen itu antara lain Buku Statistik Sektoral Tahun 2024 dan Buku Mangarai Barat Dalam Angka. Anggaran tersedia Rp. 30.248.400,- dan realisasi Rp. 27.021.500,- dengan capaian penyerapan anggaran 89,33%.
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi: Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 140%. Hasil yang dicapai adalah 7 orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi dari target 5 Orang. Anggaran tersedia Rp.

16.863.800,- dan realisasi Rp. 16.757.000,- dengan persentase capaian penyerapan anggaran 99.37%.

- Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral: capaian kinerja sub kegiatan ini adalah 1 dokumen metadata data statistik sektoral dari target 1 dokumen maka persentase capaian kinerja sub kegiatan ini adalah 100%. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini adalah Rp. 10.522.600,- dan realisasi Rp. 3,678,000 dengan persentase penyerapan anggaran 34.95%.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Tahun 2024 program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ada dua yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 150 %. Hasil yang dicapai adalah 9 Dokumen perencanaan dari target 6 Dokumen. Dimana anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Rp 9.900.000,- dan realisasi Rp. 9.587.200,- dengan capaian penyerapan anggaran 96,84 %.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD: Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah 120 %. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah 18 Dokumen Laporan Keuangan 2024 dari target 15 dokumen, Anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 2.509.300,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.370.200,- atau persentase penyerapan sebesar 54,60%.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi: Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah 10 orang pegawai dari target 3 orang pegawai dengan anggaran Rp. 237.500,- dan realisasi sebesar Rp. 227.000,- dengan capaian penyerapan anggaran 95,58%.

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik:

capaian kinerja sub kegiatan ini adalah 5 aplikasi penyelenggaraan proses bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik dari target hanya 2 aplikasi atau 250%. Anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan sub kegiatan Rp. 51.050.000,- dan realisasi adalah sebesar Rp. 48.750.000,- atau persentase penyerapan anggaran sebesar 95,49%.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi: capaian kinerja sub kegiatan adalah 7 orang yang mengikuti pelatihan peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi dari target 5 Orang atau persentase tingkat capaian terhadap target adalah 140%. Anggaran tersedia Rp. 16.863.800,- dan realisasi Rp. 16.757.000,- dengan persentase capaian penyerapan anggaran 99.37%.

2.1.4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan

Pelaksanaan Program / Kegiatan /Sub Kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat belum semua memenuhi target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Faktor Penyebab tidak/belum tercapainya target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan karena Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut pelaksanaannya belum/tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.
 - a) Terbatasnya kapasitas akses internet dalam melayani kebutuhan data internet keseluruhan OPD dan Kecamatan
 - b) Bahwa terdapat kegiatan dalam program yang tidak dianggarkan karena terbatas alokasi anggaran, sehingga mengurangi capaian program
2. Faktor Penyebab terpenuhinya Program / Kegiatan /Sub Kegiatan yang mencapai target karena Program / Kegiatan /Sub Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian besar kegiatan/sub kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
3. Faktor-faktor penyebab Program / Kegiatan /Sub Kegiatan yang pencapaiannya melebihi target karena adanya tuntutan, kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang hingga awal 2024 tidak didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai dan terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, yang kemudian disesuaikan kembali dengan Program Kegiatan tersebut sesuai peraturan. Maka terjadilah Perubahan Indikator kinerja dan target capaian program kegiatan Renstra akan mengalami perubahan sesuai kondisi yang ada. Adanya efisiensi atau penghematan dalam penggunaan anggaran (dalam rangka *refocusing*), berimplikasi terhadap tidak tercapainya target kinerja sasaran dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Barat yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target program/kegiatan/sub kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil kebijakan seperti berikut:

- a) Penyesuaian target capaian pada Tahun anggaran 2024;
- b) Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan;
- c) Penambahan pagu anggaran untuk sub kegiatan yang mencapai target;
- d) Hendaknya kegiatan yang tidak memenuhi target tetap diprioritaskan dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya;
- e) Perubahan target capaian kinerja di akhir periode Renstra;
- f) Efisiensi alokasi belanja;
- g) Penambahan alokasi pagu anggaran.

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (Tahun berjalan) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika s/d tahun 2024

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2024 (Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024		
			K	Rp.				Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Anggaran TA. 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra SKPD (%)
												K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai Standar												
2 16 01 2.01	A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.117.300						9.989.400	100%		76.946.550	
2 16 01 2.01 01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	9.900.000	8 Lap.	8 Lap.	8 Lap.	100% dan 13 Dok	9 Lap.	8.267.600	150%	9 Lap.	67.899.650	100%
2 16 01 2.01 07	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dok	3.096.600	7 Lap.	7 Lap.	7 Lap.	100% dan 13 Dok	7 Lap.	1.721.800	100%	7 Lap.	9.046.900	100%
2 16 01 2.02	B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Dok dan 15 Lap.	2.437.764.133						2.283.085.999	100%		8.108.976.896	
2 16 01 2.02 01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dok	2.219.886.373	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100% dan 16 Dok dan 15 Lap.	1 Dokumen	2.111.661.714	100%	1 Dok.	6.998.306.211	100%
2 16 01 2.02 02	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	191.742.460	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100% dan 16 Dok dan 15 Lap.	1 Dokumen	170.054.085	100%	1 Dok.	1.099.861.685	100%
2 16 01 2.02 07	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	15 Lap.	2.509.300	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100% dan 16 Dok dan 15 Lap.	10 Laporan	1.370.200	100%	10 Laporan	10.809.000	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA. 2026

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2024 (Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024			
			K	Rp.				Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Anggaran TA. 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra SKPD (%)	
												K	Rp.		K
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD													
2 16 01 2.03	C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1 Dok	19.367.400					19.066.000			59.523.400		
2 16 01 2.03 06	1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	19.367.400	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100% dan 1 Dok	1 Dok.	19.066.000	100%	1 Dok.	59.523.400	100%
2 16 01 2.04	D.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen Administrasi Pendapatan Daerah	0 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 16 01 2.04 07	1.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 16 01 2.05	E.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terfasilitasinya ASN mengikuti Pelatihan	3 OK	575.600					3 OK	-	333,33 %	36 OK	17,059,627	
2 16 01 2.05 09	1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 OK	575.600	0 OK	2 OK	24 OK	100% dan 12 OK	10 OK	-	333,33%	36 OK	17.059.627	108%
2 16 01 2.06	F.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dok	163.441.500					2 Dok.	116.420.900	100%		626.554.308	
2 16 01 2.06 01	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.183.400	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100% dan 2 Dok	1 Paket	6.781.000	100%	1 Paket	33.601.033	100%
2 16 01 2.06 02	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.021.700	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100% dan 2 Dok	1 Paket	14.685.700	100%	1 Paket	86.913.350	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA. 2026

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan		Indikator Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2024 (Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024		
				K	Rp.				Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Anggaran TA. 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra SKPD (%)
													K	Rp.	
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
2 16 01 2.06 04	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.059.700	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100% dan 2 Dok	1 Paket	5.250.000	100%	1 Paket	47.622.000	100%
2 16 01 2.06 05	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.090.200	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100% dan 2 Dok	1 Paket	7.562.500	100%	1 Paket	66.855.350	100%
2 16 01 2.06 07	5.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	9.921.000	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100% dan 2 Dok	1 Paket	4.341.500	100%	1 Paket	30.534.200	100%
2 16 01 2.06 08	6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Lap.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 16 01 2.06 09	7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Lap.	76.068.300	20 Lap.	22 Lap.	25 Lap.	100% dan 2 Dok	23 Lap.	73.000.200	92%	67 Lap.	343.093.289	134%
2 16 01 2.06 10	8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dok.	5.097.200	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100% dan 2 Dok	1 Dok.	4.800.000	100%	1 Dok.	20.088.900	100%
2 16 01 2.07	G.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 16 01 2.07 01	1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 16 01 2.07 06	2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 16 01 2.08	H.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Dok	42.492.000					1 Dok.	18.774.700	100%		108.048.597	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA. 2026

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan		Indikator Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2024 (Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024		
				K	Rp.				Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Anggaran TA. 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra SKPD (%)
													K	Rp.	
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
2 16 01 2.08 01	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap.	5.492.000	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100% dan 1 Dok.	1 Laporan	3.048.500	100%	1 Lap.	25.282.500	100%
2 16 01 2.08 02	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap.	39.000.000	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100% dan 1 Dok.	1 Laporan	15.726.200	100%	1 Lap.	82.766.097	100%
2 16 01 2.09	I.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik	1 Dok.	69.900.000					1 Dok.	48.127.450	100%		524.879.466	
2 16 01 2.09 01	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	55.500.000	14 Unit	14 Unit	12 Unit	100% dan 1 Dok.	12 Unit	42.137.450	85,71%	40 Unit	163.971.466	74,07%
2 16 01 2.09 06	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	14.400.000	15 Unit	19 Unit	19 Unit	100% dan 1 Dok.	10 Unit	5.990.000	100%	53 Unit	29.433.000	126,19%
2 16 01 2.09 09	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	80%	119.789.600						103.287.450			836.895.886	
			Persentase OPD yang memiliki PPID pembantu aktif	75%											
2 16 02 2.01	A.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	100%	119.789.600						103.287.450			836.895.886	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA. 2026

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2024 (Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024		
			K	Rp.				Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Anggaran TA. 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra SKPD (%)
												K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
2 16 02 2.01 02	1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 dok	8.820.000	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	80%, 75% dan 100%	2 Dok.	8.473.500	100%	4 dok	9.997.500	100%
2 16 02 2.01 03	2. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dok.	-	-	2 Dok.	182.948.000	100%
2 16 02 2.01 04	3. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	N/A	38.936.800	-	-	1 Dokumen	80%, 75% dan 100%	1 Dok.	29.164.900	100%	1 Dok.	35.641.600	100%
2 16 02 2.01 05	4. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dok.	238.409.736	100%
2 16 02 2.01 06	5. Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	-	-	1 Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	11 Dok.	325.000	55%
2 16 02 2.01 10	6. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-	0	0	0 Dokumen	-	-	-	-		30.000.000	
2 16 02 2.01 12	7. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 dok	72.032.800	15 KIM	1 Dokumen	1 Dokumen	80%, 75% dan 100%	1 Dok.	65.649.050	100%	1 Dok.	339.574.050	100%
2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi	75%	1.537.835.400					85,71 %	1.473.361.579			7.581.354.569	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA. 2026

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan		Indikator Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub kegiatan		Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2024 (Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024				
					K	Rp.	Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023	Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Anggaran TA. 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra SKPD (%)
														K	Rp.	
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75%						85,71 %						
2 16 03 2.01	A.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.537.835.400					100%	1.473.361.579			7.581.354.569		
2 16 03 2.02 01	1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	1.379.462.900	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75%, 75% dan 100%	1 Dok.	1.353.157.034	100%	1 Dok	4.714.229.491	100%	
2 16 03 2.02 03	2.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	1 unit	39.935.200	0 Unit	1 Unit	1 Unit	75%, 75% dan 100%	1 Unit	38.000.000	100%	2 Unit	148.567.392	100%	
2 16 03 2.02 04	3.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 dok	48.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75%, 75% dan 100%	1 Dok.	33.092.945	100%	1 Dok.	2.111.843.895	100%	
2 16 03 2.02 07	4.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 Aplikasi	51,050,000	0 Aplikasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi	75%, 75% dan 100%	5 Aplikasi	48.750.000	250%	10 Aplikasi	275.909.391	100%	
	5.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	-		1 Dokumen	-	-	-	-		1 Dok.	34.461.200		

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA. 2026

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan		Indikator Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2024 (Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024		
				K	Rp.				Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Anggaran TA. 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra SKPD (%)
													K	Rp.	
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
	6.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		-	0 Layanan	0 Layanan	0 Layanan	-	-	-	0%	0 Layanan	21.744.500	0%
2 16 03 2.02 08	7.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Master Plan Smart City	2 Dok	19,387,300	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75%, 75% dan 100%	1 Dok.	361.600	50%	2 dok	218.869.150	100%
2 16 03 2.02 10	8.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 dok	55.729.550	100%
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase OPD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan	60%	57.634.800					60,47 %	47.456.500			156.544.880	
2 20 02 2.01	A.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	57.634.800					1 Dok.	47.456.500			156.544.880	
2 20 02 2.01 01	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dok	5.150.000	3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.	50% dan 3 Dokumen	2 Dok.	27.021.500	66,67%	3 dok	124.478.880	100%
2 20 02 2.01 02	2.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	5 OK	30.248.400	0	5 OK	1 OK	50% dan 3 DOkumen	7 OK	16.757.000	140%	6 OK	28.388.000	60%

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA. 2026

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2024 (Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024		
			K	Rp.				Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Anggaran TA. 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra SKPD (%)
												K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dok	10.522.600					1 Dok.	3.678.000	100%		3.678.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI												-	
	A. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-									-	
	1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-									-	
			Total	4.440.171.033						4.119.317.778			17.259.888.293	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat memiliki fungsi strategis dalam pencapaian Misi kelima Bupati (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel dan Melayani) yaitu Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Penguatan Lembaga Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam menentukan skala penilaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat mengacu pada Standar Pelayanan Minimal bidang Komunikasi dan Informatika sesuai indikator yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota.

Berikut capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2024 berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Barat, dapat dijelaskan pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 berikut. Tabel 2.2 menjelaskan capaian sd 2021 sesuai Renstra 2016-2021 sedangkan tabel 2.3 menjelaskan capaian tahun 2024 berdasarkan Renstra 2021-2026. Indikator dan sasaran pada Renstra berbeda sehingga penilaian baru dimulai tahun 2022.

Tabel 2. 2

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -						Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Menyediakan sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Manggarai Barat dalam angka dan Buku PDRB	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Manggarai Barat dalam angka dan Buku PDRB	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	TA	Ada	100	100	100	100	-	100
Buku Kabupaten Dalam Angka			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	TA	Ada	100	100	100	100	-	100
Buku PDRB			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	TA	Ada	100	100	100	100	-
	Mewujudkan Perangkat Daerah yang menggunakan sistem persandian	Terwujudnya Perangkat Daerah yang menggunakan sistem persandian	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi dalam Komunikasi	0	3	7	17	27	37	0	0	1	1	1	1	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
	Menyediakan akses Komunikasi dan Informasi serta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan	Tersedianya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM ditingkat Kecamatan	6	11	21	31	41	51	0	5	10	15	15	0	0	45,45	47,62	48,39	36,59	29,41

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -						Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Tersedianya akses komunikasi dan informasi	Persentase Desa/ Kelurahan yang Terakses Telekomunikasi	43,24	53,24	70	80	90	100	20	34	75	80	90	100	46,25	63,86	107,14	100	100	100
			Persentase Desa/ Kelurahan yang Bisa diakses RSPD	42,60	50,30	59,17	73,96	88,76	100	50	67	75	71	88,76	100	117,37	133,2	126,75	95,99	100	100
			Persentase OPD yang Menerapkan e-Government	12,5	40,91	50	61,36	79,55	79,55	15	40,91	50,00	60	80	80	120	100	100	97,78	100,57	100,57
			Persentasi Wilayah Kecamatan Terlayani Akses Internet	20	36,65	53,33	70,00	86,67	100	20	35	50	77	90	100	100	95,5	93,76	110	103,84	100

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Kondisi Awal (2020)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi			53,76	65	68	71	74	77	NA	74,3	-	-	90%	100%	Utk tahun 2023 tidak penilaian Indeks reformasi birokrasi, karena masih menunggu peraturan teknis dari KemenpanRB
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2,15	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	2,15	3,01	3,44	3,47	3,65	3,95	
3.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)			0%	60%	70%	80%	90%	100%	90,14%	90,14%	100%	50%	90%	100%	
4.	Persentase OPD yang memiliki PPID pembantu aktif			3%	25%	50%	75%	85%	100%	4,87%	9,75%	12,19 %	43,75 %	85%	100%	Jumlah PPID pembantu aktif berdasarkan jumlah OPD yang aktif membagikan data pada website PPID
5.	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategi pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah			25%	40%	55%	70%	85%	100%	89,31%	89,36%	90%	91,67 %	85%	100%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Kondisi Awal (2020)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			25%	50%	60%	75%	85%	100%	80%	80%	84,62 %	85,71 %	85%	100%	
7.	Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi			40%	50%	60%	75%	85%	100%	50%	50%	70%	85,71 %	85%	100%	
8.	Persentase OPD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan			38%	45%	50%	60%	70%	80%	31,71%	51,23%	58,54 %	60,47 %	70%	80%	
9.	Tingkat keamanan informasi pemerintah			10%	15%	20%	25%	30%	35%	10%	10%	10%	70,70 %	30%	35%	
10.	Persentase aplikasi persandian yang diterapkan dalam SPBE			10%	20%	30%	40%	50%	60%	10%	10,19%	31,58 %	31,58 %	50%	60%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat

Dengan Kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya maka Pemerintah Daerah memerlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dalam merumuskan, mendesain dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah kedalam pola pemerintah daerah, dengan organisasi pemerintah kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dan sebagai proses interaksi antara pemerintah institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Pada bahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa secara umum kinerja pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat sudah menunjukkan hasil yang optimal, baik dari pencapaian sasaran kinerja RPJMD maupun Penyerapan anggaran. Namun demikian, masih terdapat isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat terkait kinerja pelayanan OPD yaitu :

1. Perlunya meningkatkan SDM Aparatur Bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi;
2. Perlunya meningkatkan Sarana Prasarana Bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Perlunya meningkatkan Kerjasama Masyarakat, Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan TIK;
4. Perlunya meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informasi Kepada Masyarakat melalui Berbagai Media;
5. Perlunya meningkatkan kualitas Pengelola Informasi Daerah demi terciptanya keterbukaan informasi publik yang berkualitas;
6. Perlunya mengoptimalkan Penerapan *E-Government* di Kabupaten Manggarai Barat;
7. Perlunya meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah tujuan pariwisata internasional memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang mudah dan dapat terjangkau. Agar pelayanan publik dapat diberikan dengan efektif dan efisien, maka dukungan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sangat dibutuhkan. Dukungan tersebut tidak hanya terbatas sampai pada *front office* saja, namun juga dibutuhkan integrasi pada sistem *back office*-nya sehingga didapatkan rumusan isu strategis yaitu terintegrasinya berbagai sistem pelayanan baik untuk masyarakat maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan;

8. Pengembangan sistem pelayanan publik yang terintegrasi tentunya membutuhkan dukungan infrastruktur yang tidak sedikit. Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, juga harus diikuti dengan pengoptimalan infrastruktur yang ada, agar tidak membebani anggaran mengingat Kabupaten ini juga masih memiliki program-program prioritas yang harus dilaksanakan, seperti pendidikan dan kesehatan sehingga didapatkan rumusan isu strategis yaitu perlunya pengembangan Jaringan informatika dan Jaringan telekomunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK.;
9. Pengembangan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan didukung dengan infrastruktur yang memadai, tentunya tidak akan optimal tanpa adanya partisipasi dari masyarakat untuk memanfaatkan. Dalam pengembangan sistem pelayanan publiknya Pemerintah Daerah juga harus mempertimbangkan kemudahan pemanfaatannya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sehingga didapatkan rumusan isu strategis yaitu Mengoptimalkan saluran komunikasi publik untuk mendorong masyarakat memanfaatkan layanan berbasis TIK yang telah disediakan;
10. Kabupaten Manggarai Barat melalui mekanisme *assessment* telah terpilih menjadi peserta Gerakan Menuju 100 Smart City" yang merupakan kegiatan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, hendaknya menjadi motivasi dalam menghadapi dan mengimplementasikan transformasi digital pada instansi pemerintah dalam skala yang luas dan menjaring ke seluruh wilayah Kecamatan dan Desa serta ke berbagai sektor;
11. Perlunya memaksimalkan pelaksanaan PPID Pembantu di setiap OPD.

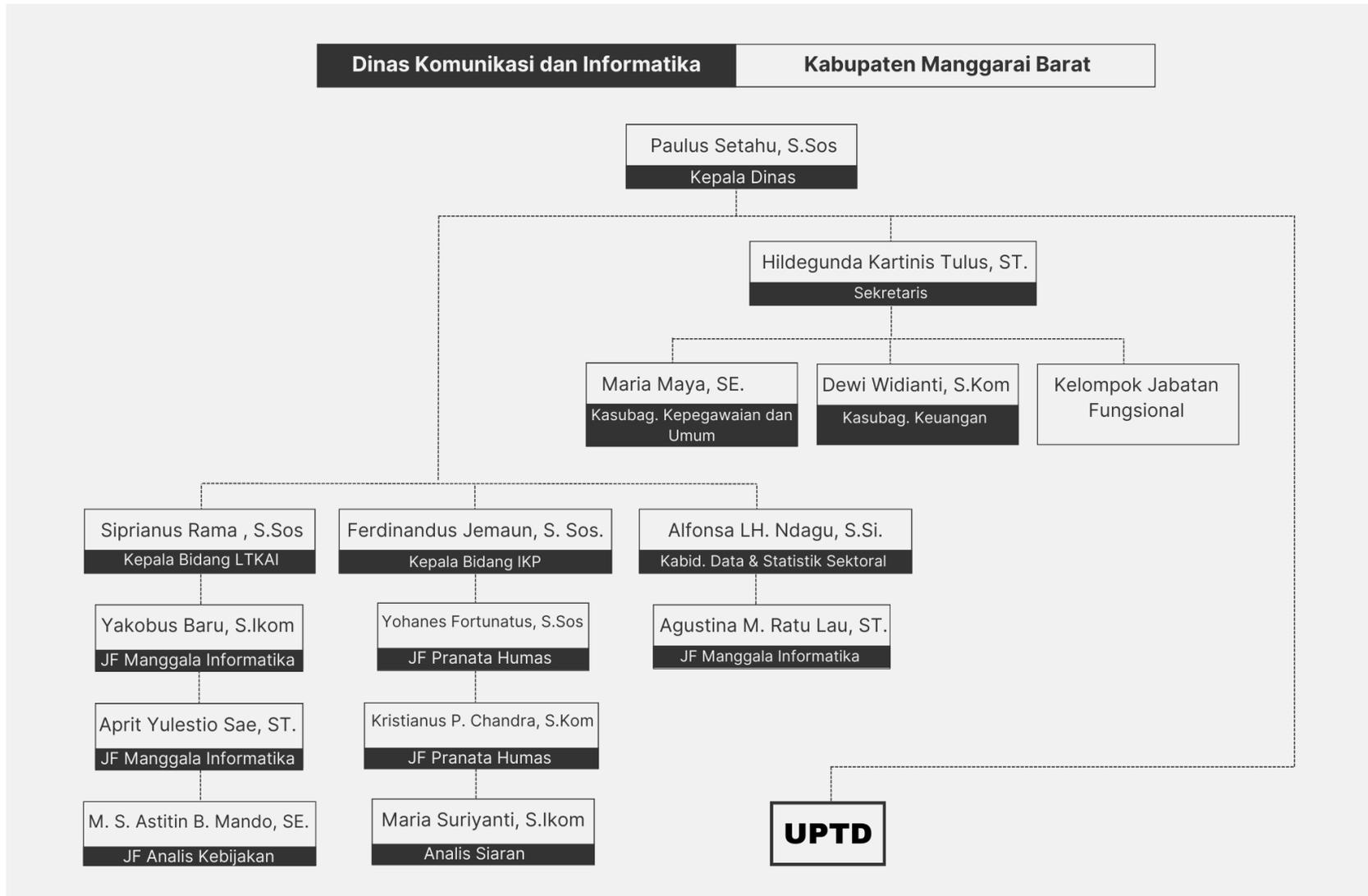
Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat pada Renja Tahun 2023 aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada table 2.4

Tabel 2. 4
Nama ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

NO.	NAMA	GOLRU	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1.	Paulus Setahu, S.Sos Nip. 196806292000121004	IV/c	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	S-1 Sosial Politik
2.	Hildegunda Kartini Tulus, ST. Nip. 197904202005012010	IV/b	Sekretaris	S-1 Komputer Teknik Informatika
3.	Ferdinandus Jemaun, S.Sos Nip. 197502082009041002	IV/a	Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	S-1 Komunikasi Jurnalistik

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA. 2026

NO.	NAMA	GOLRU	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
4.	Siprianus Rama, S.Sos. Nip. 197904032011011008	IV/a	Kepala Bidang Layanan Tata Kelola Aplikasi Informatika	S-1 Ilmu Komunikasi
5.	Alfonsa Lidya Handini Ndagu, S.Si Nip. 197308022000122005	IV/a	Kepala Bidang Data Dan Statistik Sektoral	S-1 MIPA Biologi
6.	Maria Maya, SE. Nip. 198401122009042005	III/d	Kepala Subbagian Kepegawaian Dan Umum	S-1 Manajemen
7.	Dewi Widianti, S.Kom. Nip. 19810517200904200	III/d	Kepala Subbagian Keuangan	S-1 Teknik Informatika
8.	Yohanes Fortunatus, S.Sos. Nip. 197111262006041011	III/d	Pranata Humas Ahli Muda	S-1 Komunikasi
9.	Yakobus Baru, S.Ikom. Nip. 196907241999031006	III/d	Manggala Informatika Ahli Muda	S-1 Ilmu Komunikasi
10.	Agustina Maria Ratu Lau, ST. Nip. 198008222011012003	III/d	Manggala Informatika Ahli Muda	S-1 Teknik Sipil
11.	Aprit Yulestio Sae, ST. Nip. 198304252010011019	III/d	Manggala Informatika Ahli Muda	S-1 Teknik Elektro
12.	Maria S. Astitin B. Mando, SE. Nip. 198702042010011009	III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S-1 Ekonomi
13.	Kristianus Panjo Candra, S.Kom. Nip. 198707262011011007	III/d	Pranata Humas Ahli Muda	S-1 Teknik Informatika
14.	Syahrul Iman, ST., MT. Nip. 198306252010011029	III/d	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	S-2 Teknik Elektro
15.	Lusia Lumbur, A.Md. Nip. 197109012011012002	III/b	Pengelola Keuangan	S-1 Akuntansi
16.	Maria Suryanti, S.I.Kom. Nip. 197611082012122002	III/b	Analisis Berita	S-1 Ilmu Komunikasi
17.	Magdalena Sabu Nip. 197805292000122001	III/b	Pengadministrasian Kepegawaian	SMK
18.	Veronika Ledis Nuer Nip. 198306072007012006	II/d	Pengadministrasian Penerimaan	SMA A.3/IPS
19.	Adam Malik Nip. 198403092012121004	II/c	Pengadministrasian Keuangan	SMK Manajemen Bisnis
20.	Maria Lenita Daun, A.Md.Kom. Nip. 197304142007012026	II/c	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	D-III Manajemen Informatika
21.	Adriyanto Rusman Nip. 198303012012121005	II/b	Teknisi Alat Elektro Dan Alat Komunikasi	SMA Paket C
22.	Modestus Mulya Ming, SH. Nip. 197704052023211008	IX	Ahli Pertama – Perencana	S-1 Hukum
23.	Patrisius YB. Mari, S.Kom Nip. 198701112023211023	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 Teknik Informatika
24.	Efrem Hjoniargo Nganta, S.Kom Nip. 199506082023211015	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 Sistem Informatika
24.	Yasinta Mathildis Riberu, SS. Nip. 198604272023212032	IX	Pranata Humas Ahli Pertama	S-1 Sastra
25.	Gaudensius Budiman Hading, A.Md Nip. 198308222023211000	VII	Pranata Humas Terampil	D-III Pariwisata



Gambar 2. 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Minimnya sarana prasarana pendukung penerapan SPBE;
2. Rendahnya tata Kelola dan layanan SPBE;
3. Belum memadainya kapasitas SDM bidang IT;
4. Minimnya regulasi yang mengatur tata Kelola dan layanan SPBE;
5. Masih rendahnya penyelenggaraan keamanan informasi;
6. Minimnya perangkat daerah yang menggunakan persandian dalam komunikasi;
7. Belum optimalnya PPID Pembantu dalam menjalankan tugas;
8. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan statistik sektoral;
9. Belum maksimalnya operator website hasil ev-OPD membuat dan Mempublikasikan berita OPD di website masing-masing OPD.

Sedangkan faktor-faktor penghambat:

1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal;
2. Koordinasi internal belum optimal;
3. Kurangnya integrasi data;
4. Kurangnya kapasitas pengelola data sektoral;
5. Belum tersedianya perangkat pendukung pelayanan keamanan informasi;
6. Rendahnya peran aktif stakeholder dan PPID Pembantu.

2.3.3. Dampak isu-isu strategis terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Program Nasional

Dampak yang ditimbulkan dari adanya isu-isu strategis bidang Komunikasi dan Informatika yaitu kurang maksimalnya pelayanan pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik, baik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui implementasi *e-government* maupun dalam menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan Teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa melalui penciptaan masyarakat informasi Indonesia. Selain itu penyediaan kebijakan tata Kelola SPBE dan pelaksanaan satu data Indonesia di Kabupaten Manggarai Barat agar ditingkatkan.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat perlu mengetahui dinamika tantangan yang peluang diadakan, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Kominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. **Tantangan:**

- a. Perkembangan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat cepat;
- b. Dalam menunjang Pariwisata sebagai leading sektor, Dinas Komunikasi dan Informatika harus mampu menyiapkan informasi yang terpusat dan mudah dijangkau bagi wisatawan yang datang maupun bagi masyarakat Manggarai Barat itu sendiri. Mengingat semakin meningkatkannya kunjungan wisatawan di Manggarai Barat apalagi Manggarai Barat telah ditetapkan sebagai daerah otorita pariwisata nasional oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian tuntutan akan kebutuhan pelayanan publik dan pelayanan administrasi berbasis TIK terus berkembang semakin cepat;
- c. Menjadi tantangan bagi Pemda untuk lebih meningkatkan kemudahan akses informasi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat;
- d. Jangkauan siaran Radio Pemerintah Daerah yang belum sampai pada wilayah pelosok maupun wilayah pulau, pengelolaan siaran radio Pemerintah Daerah yang belum maksimal, pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat belum maksimal dll. hal ini sangat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
- e. Tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good governance* dan pelayanan prima, memacu Dinas Komunikasi dan Informatika untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya terutama menerapkan *e-Government*.
- f. Sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika yang belum memadai karena belum adanya tenaga teknis yang benar-benar mendalami pendidikan formal tentang teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana bidang Komunikasi dan Informasi dalam menunjang kegiatan pelayanan bagi masyarakat masih relatif rendah dan belum memadai. Hal ini disebabkan karena masih adanya asumsi bahwa pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika tidak secara langsung

memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD. Padahal fungsi utama bidang Komunikasi dan Informatika lebih diutamakan dalam memberikan pelayanan informasi pembangunan bagi masyarakat serta sebagai *Leading Sector* dibidang Pembangunan TIK dalam rangka mewujudkan *E-Government* dan Manggarai Barat *Smart City*.

- h. Adanya potensi pendapatan dibidang Komunikasi dan Informatika yang masih belum terjamah. Sehingga perlu dilakukan kajian ulang yang menyeluruh terhadap sumber-sumber PAD tersebut untuk dibuatkan landasan hukumnya.
- i. Ketersediaan SDM masih sangat terbatas.

2. **Peluang**

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai instansi vital yang memainkan peranan penting dalam Misi ke-5 Bupati Manggarai Barat untuk lima tahun ke depannya;
- b. Adanya konsep smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat;
- c. Dengan telah ditetapkannya Labuan Bajo sebagai bagian dari 5 (lima) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas/ Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), maka ini adalah peluang bagi Pemda Kabupaten Manggarai Barat untuk mengusulkan anggaran kepada Pemerintah Pusat untuk pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi di Kab. Manggarai Barat;
- d. Pembuatan dan pengembangan standar pelayanan minimal (SPM) Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai SOP yang ada;
- e. Melaksanakan aturan yang ada termasuk pemberian fasilitas kepada masyarakat pengusaha dibidang Komunikasi dan Informasi, seperti Pembangunan Menara Telekomunikasi, usaha internet, Usaha/Kounter telepon seluler dan lain-lain;
- f. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai aturan-aturan yang ada;
- g. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika. Serta pengajuan permohonan untuk formasi tenaga teknis dibidang Komunikasi dan Informasi kepada Badan Kepegawaian Daerah;
- h. Menginventarisasi dan menindak lanjuti potensi-potensi PAD yang selama ini belum tersentuh;
- i. Pengawasan internal yang melekat dan berjenjang di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Mengefektifkan tenaga-tenaga Dinas Komunikasi dan Informatika yang ada.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting / rekomendasi

Dari penjabaran isu - isu penting di atas direkomendasikan dapat hal - hal sebagai alternatif/upaya pemecahan masalah, yaitu:

1. Perlunya mengikut sertakan PNS untuk mengikuti pendidikan formal dan pelatihan bidang Teknologi Informasi yang dibiaya oleh APBD Kabupaten Manggarai Barat dan APBN Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
2. Perlunya meningkatkan volume kegiatan pendampingan PPID Pembantu agar semakin aktif;
3. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Kabupaten Manggarai Barat;
4. Perlunya Menyusun kebijakan tata Kelola SPBE.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, dokumen perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen perencanaan tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan program / kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat melakukan review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024. Berdasarkan hasil review tersebut, ternyata ada beberapa kegiatan yang dapat digabungkan dalam RKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024. Pada Tabel 2.5 berikut ditampilkan Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan juga hasil Input pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Tabel 2. 5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.025.640.183	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.025.640.183
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					26.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					26.000.000
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	17.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	17.000.000		
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	9.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	9.000.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.400.725.297	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.400.725.297
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	2.130.453798	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	2.130.453798		
4.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	260.271.499	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	260.271.499		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	10.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					21.710.115	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					21.710.115
6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.710.115	21.710.115	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	19.367.400	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					52.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					52.000.000
8.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang/Kegiatan	52.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang/Kegiatan	52.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					344.224.787	Administrasi Umum Perangkat Daerah					344.224.787

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.000.000	
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
11.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
12.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	27.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	27.000.000	
13.	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Manggarai Barat, Komodo,	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	26.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Manggarai Barat, Komodo,	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	26.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wae Kelambu					Wae Kelambu				
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	132.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	132.000.000	
16.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8.224.787	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8.224.787	
17.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	80.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	80.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					49.479.984	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					49.479.984
17.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	1 Unit	24.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	1 Unit	24.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.479.984	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.479.984	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.000.000
18.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.600.000	
19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48.000.000	48.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	47.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					74.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					74.500.000
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	14 Unit	67.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	14 Unit	67.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dibayarkan Pajaknya					dibayarkan Pajaknya			
21.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					320.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					320.000.000
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					320.000.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					320.000.000
22.	Diseminasi Informasi	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi Informasi	4 Dokumen	100.000.000	Diseminasi Informasi	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi Informasi	4 Dokumen	100.000.000	
24.	Penyusunan Konten	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Konten	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	43.936.800	
26.	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan	1 Dokumen	120.000.000	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan	1 Dokumen	120.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Informasi Program atau Kebijakan					Informasi Program atau Kebijakan				
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.131.403.815	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.131.403.815
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.131.403.815	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.131.403.815
27.	Penyediaan Akses Internet	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen laporan Hasil penyediaan internet OPD	1 Dokumen	1.409.750.000	Penyediaan Akses Internet	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen laporan Hasil penyediaan internet OPD	1 Dokumen	1.420.762.900		
28.	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	80.000.000	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	80.000.000		
	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	5 Aplikasi	142.405.000	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	5 Aplikasi	142.405.000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	314.052.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	314.052.000	
29.	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	140.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	140.000.000	
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	1 Dokumen	45.196.815	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	1 Dokumen	45.196.815	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					72.000.000					72.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					72.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					72.000.000
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					72.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					72.000.000
33.	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Manggarai Barat, Komodo,	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	3 Dokumen	42.000.000	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Manggarai Barat, Komodo,	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	3 Dokumen	42.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Labuan Bajo	Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				Labuan Bajo	Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
34.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	5 Orang	30.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	5 Orang	30.000.000	

3.1. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Hal ini berguna untuk menjaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan kepentingan terkait pelayanan OPD. Dalam konteks itulah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat mengakomodir usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat, dan kepentingan sesuai dengan isu – isu strategis dalam penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika.

Adapun usulan program dan kegiatan yang telah diakomodir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan penelitian lapangan, surat-surat permohonan pemasangan jaringan internet yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat. Usulan saat musrenbang sebagian besar terkait akses internet untuk fasilitas umum dan penambahan bandwidth untuk Akses Internet eksisting. Terhadap usulan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengajukan permohonan ke BAKTI Kementerian Kominfo.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Arah Kebijakan Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan umum nasional bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Identifikasi Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Meningkatkan ketersediaan dan akses informasi melalui pemanfaatan teknologi broad band menuju terbentuknya masyarakat pengetahuan dalam kerangka NKRI;	Renstra Kementerian Kominfo RI Tahun 2020 - 2024	
2.	Mewujudkan sumber daya manusia yang inovatif melalui pembinaan kreatifitas dan peningkatan literasi TIK;	Renstra Kementerian Kominfo RI Tahun 2020 - 2024	
3.	Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing melalui pengembangan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal, serta memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam system pasar global;	Renstra Kementerian Kominfo RI Tahun 2020 - 2024	
4.	Memperkuat regulasi kominfo untuk menyongsong pertumbuhan teknologi dan kompetisi media;	Renstra Kementerian Kominfo RI Tahun 2020 - 2024	
5.	Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa	Renstra Kementerian Kominfo RI Tahun 2020 - 2024	

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat menyesuaikan atau mensinkronisasi dalam berbagai kebijakan strategis yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan akses informasi melalui pemanfaatan teknologi broadband menuju terbentuknya masyarakat pengetahuan dalam NKRI

- 1) Meningkatkan diseminasi informasi melalui berbagai media komunikasi, seperti media ruang dalam (indoor) dan media luar ruang (baliho, spanduk, banner); media tradisional seperti surat kabar dan media lainnya.
- 2) Mengkoordinasikan kelompok informasi masyarakat dengan lembaga-lembaga informasi lainnya dalam rangka penyebaran informasi;
- 3) Meningkatkan pembinaan kepada kelompok informasi dan lembaga-lembaga informasi lainnya dalam rangka pemberdayaan untuk meluruskan informasi kepada masyarakat di lingkungannya.

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang inovatif melalui pembinaan kreatifitas dan peningkatan literasi TIK, dilakukan melalui:

- 1) Peningkatan kemampuan teknologi informasi untuk mengola, mengelola dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik;
- 2) Peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
- 3) Peningkatan pemanfaatan teknologi agar pelayanan informasi dapat diakses secara mudah oleh masyarakat;
- 4) Peningkatan pelayanan informasi melalui media online;
- 5) Pengembangan dan pemuktahiran data Website Manggarai Barat Online;
- 6) Meningkatkan pelayanan pelayanan e-governance dengan merata system manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

3. Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing melalui pengembangan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal, serta memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global, dilakukan melalui:

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan lembaga kominfo skala provinsi;
- 2) Meningkatkan penyelenggaraan sosialisasi kebijakan program pemerintah;
- 3) Meningkatkan kualitas kerjasama dengan instansi kominfo kabupaten/kota;
- 4) Meningkatkan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan mitra lembaga pers dan penerbitan media;
- 5) Meningkatkan pemberdayaan pendapat umum;

4. Memperkuat regulasi kominfo untuk menyongsong pertumbuhan teknologi dan kompetisi media, dilakukan melalui:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap layanan jasa telekomunikasi dan penerapan standar teknis dan standar pelayanan dalam bentuk sertifikat dan label yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel untuk alat / perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi;
- 2) Melakukan pemetaan jaringan telekomunikasi, pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
- 3) Mengkoordinasikan pemberian ijin pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama;

5. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa, dilakukan melalui:

peningkatan diseminasi informasi melalui media massa cetak dan elektronik (televisi, radio, surat kabar dan tabloid pemerintah dan media lainnya).

3.1.2. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika seperti sektor pos, telekomunikasi, sector penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sector, mendorong terjadinya sharing/pemakaian bersama sumber daya, sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dengan seperangkat kebijakan dan regulasi.
2. Program prioritas pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, yang menekankan masalah layanan, dan kandungan informasi, serta menjangkau seluruh pelosok. Selain itu juga diarahkan pada penguatan kapabilitas masyarakat melalui pengembangan TIK berbasis lokal, peningkatan e-literacy masyarakat, pembentukan komunitas informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif menggali, mengolah, dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab, pembangunan desa informative (information villages).
3. Program prioritas Aplikasi Informatika, melalui pengembangan aplikasi telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan system layanan kepemerintahan (e-government) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan systeme- government nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik.

4. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik, melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat. Menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan Tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing Misi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Manggarai Barat selama 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026), harus sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil terpilih yaitu :

“MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP”

Makna dari Visi ini dijabarkan sebagai berikut :

1. **Mabar Bangkit**, bagi masyarakat Indonesia, istilah atau kata “Bangkit” mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam. Ketika Bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan, para pahlawan sepakat untuk bersatu dan bangkit melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Dalam Konteks Visi tersebut, kata “Bangkit” dimaknai sebagai berikut:

- ✓ Bangkit merupakan seruan dan ajakan untuk membangun kebulatan tekad bersama masyarakat Manggarai Barat untuk “bangun dari tidurnya” dan berjuang bersama melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pembangunan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi pertanian.

- ✓ Bangkit juga dimaknai sebagai suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit juga sebuah ajakan bersama yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat Manggarai Barat untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi. Semangat restorasi diharapkan membawa kerja keras seluruh komponen untuk mengejar ketertinggalan Kabupaten Manggarai Barat dalam berbagai dimensi pembangunan.

2. MANTAP merupakan singkatan dari Maju, Unggul, Tangguh dan Populer.

- ✓ **Mabar Mantap** mengandung pengertian sebuah sikap hati/keyakinan bersama dan optimisme untuk menjadikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah yang Maju, Unggul, Tangguh, dan Populer. Pembangunan daerah difokuskan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang merata, berkualitas dan memadai.
- ✓ **Mabar Mantap** juga bermakna terwujudnya kualitas SDM yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif, jujur, beretika dan berintegritas, sehingga mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan. Melalui Mabar Mantap, prioritas pembangunan akan diarahkan berdasarkan potensi daerah setempat melalui pemberdayaan masyarakat dengan menghubungkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu mandiri dan menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada sektor pariwisata dan pertanian.
- ✓ **Mabar Mantap** juga memberi arti bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan sepenuhnya berpihak pada seluruh lapisan masyarakat Manggarai Barat.

3. Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap menunjukkan tekad, semangat dan optimisme bersama seluruh masyarakat Manggarai Barat menuju perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah guna mewujudkan perbaikan-perbaikan dalam setiap dimensi pembangunan untuk **Masyarakat Manggarai Barat Yang Maju, Unggul, Tangguh dan Populer.**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Manggarai Barat “Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap”, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan pariwisata secara Berkelanjutan dan Inklusif sebagai Pengerak Utama Ekonomi;

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal;
4. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani.

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat bertujuan mendukung peerwujudan Mabar Maju Menuju Mabar mantap sejalan sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan dinamis	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel

Tabel 3. 3
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Visi : Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani				
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Optimalisasi Aplikasi E-Government untuk pelayanan publik
			Penguatan Kelembagaan Keterbukaan Informasi Publik	Integrasi aplikasi E-Government untuk layanan internal Pemerintah Daerah
				Penguatan kapasitas PPID dan PPID Pembantu
				Penguatan ruang/media interaksi masyarakat dengan Pemerintah Daerah

Tabel 3. 4
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Tahun 2025	Target	
				Target	Realisasi		2026	2027
1.	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Penilaian SPBE dilakukan oleh KemenpanRB dan di dalamnya terdapat 4 domain yang terdiri dari domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Setiap domain memiliki bobot dan nilai tingkat kematangan masing masing dalam penilaian SPBE	3,35 Indeks	3,47 Indeks	3,65 Indeks	3,95 Indeks	4,00 Indeks
2.	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Layanan Publik Online Terintegrasi adalah Layanan untuk masyarakat yang disediakan dalam bentuk aplikasi atau sistem informasi dan terhubung dengan sistem yang lain	75%	85,71%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	Data statistik sektoral adalah data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah - Perangkat Daerah pengampu untuk menjadi acuan perencanaan program dan kegiatan PD serta sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja.	60%	60,47%	70%	80%	90%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program Dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 disajikan pada Tabel Penyajian program dan kegiatan yang disusun berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Manggarai Barat.

Jumlah program yang direncanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2026 secara keseluruhan adalah 5 (empat) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota;
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Dari 5 program tersebut, dijabarkan kedalam beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan urgensinya. Dalam rancangan renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat 2026, total kegiatan yang

dilaksanakan sebanyak 12 kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 32. Kegiatan-kegiatan tersebut disusun sesuai dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif). Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp.4.218.051.998,- dan target Retribusi Menara Rp.0,-. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif disajikan dalam table 4.1 berikut :

						Perangkat Daerah							serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional					
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	300 Orang/bulan	336 Orang/bulan	336 Orang/bulan	2,500,388,398	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelmubu	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika	336 Orang/bulan	2,500,388,398	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	84,305,200	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelmubu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Dokumen	84,305,200	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA. 2026

						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	18 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	2,509,300	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelmabu	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika	10 Laporan	2,509,300	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedia Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19,190,000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	19,190,000	
	2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	19,190,000	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelmabu	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	19,190,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA. 2026

						yang Disediakan						Komodo, Wae Kela mbu	RAH (PAD)	Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional				
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9,450,000	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kela mbu	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional	Organisasi Perangkat Daerah	1 Paket	9,450,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25,552,000	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kela mbu	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional	Organisasi Perangkat Daerah	1 Paket	25,552,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyeleng	225 Lap	23 Lapo ran	25 Lapo ran	25 Lapo ran	106,366,500	Kab. Manggar	PEN DAPA TAN	Memperkuat Reformasi Politik,	4. Reformasi birokrasi	Organisasi Perangkat Daerah	25 Lapo ran	106,366,500	DINAS KOMUNIKASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA. 2026

						araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ora n					ai Bara t, Kom odo, Wae Kela mbu	ASLI DAE RAH (PAD)	Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan Tata Kelola Pemerinta han yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional				DAN INFORMA TIKA
	2	16	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok ume n	1 Doku men	1 Dok ume n	1 Doku men	5,355,000	Kab. Man ggar ai Bara t, Kom odo, Wae Kela mbu	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerinta han yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional	Organisasi Perangkat Daerah	1 Doku men	5,355,000	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMA TIKA
						Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok ume n	1 Doku men	1 Dok ume n	1 Doku men	5,355,000	Kab. Man ggar ai Bara t, Kom odo, Wae Kela mbu	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerinta han yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional	Organisasi Perangkat Daerah	1 Doku men	5,355,000	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMA TIKA
	2	16	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA. 2026

						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	44,150,000	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelmambu	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional	Organisasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	44,150,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedia dokumen pengadaan barang/jasa	4 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	156,000,000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Dokumen	156,000,000	
	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	50,000,000	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelmambu	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Unit	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

						strategi komunikasi (STARKOM) - Persentase OPD yang Memiliki PPID Pembantu Aktif														
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggara Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	370,000,000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional	Masyarakat Manggarai Barat dan stakeholder	100 %	370,000,000	
	2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi														
						Jumlah dokumen hasil diseminasi informasi	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	Kab. Manggarai Barat, Semau	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan,	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang	Masyarakat Manggarai Barat dan stakeholder	2 Dokumen	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

												Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional					
	2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik													
						Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	120,000,000	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Klamu	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional	Masyarakat Manggarai Barat dan stakeholder	2 Dokumen	120,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten													
						Jumlah Konten Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300 Konten	150,000,000	Kab. Manggarai	PEN DAPA TAN ASLI	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	4. Reformasi birokrasi 4.	Masyarakat Manggarai Barat dan stakeholder	300 Konten	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN

												Barat, Komodo, Wae Klamby	DAE RAH (PAD), DAN ALOKASI UMUM (DAU)	(SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional				INFORMATIKA
3.	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi	100 %	85.71 %	87 %	100 %	2,066,910,000					100 %	2,066,910,000	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,066,910,000		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional	Pemda Kabupaten Manggarai Barat	1 Dokumen	2,066,910,000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

						dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE					Wae Kela mbu	PAJA K BAH AN BAKA R KEN DAR AAN BER MOT OR (PBB KB), DAN A ALOK ASI UMU M (DAU)	Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional					
2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	43 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	1,442,600,000	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kela mbu	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD) , DAN A ALOK ASI UMU M (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z),	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik Profesional	Pemda Kabupaten Manggarai Barat	43 Perangkat Daerah	1,442,600,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TA. 2026

2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	92,250,000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan Masyarakat	1 Dokumen	92,250,000	
2	20	02	2.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
						Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	45 Orang	7 Orang	40 Orang	45 Orang	50,250,000	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelmubu	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik yang Profesional	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan Masyarakat	45 Orang	50,250,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	02	2.01	0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral														
						Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	42,000,000	Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelmubu	PEN DAPA TAN ASLI DAE RAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Reformasi birokrasi 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Pelayanan Publik	Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan Masyarakat	3 Dokumen	42,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB V
PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026. RKPD Tahun 2026 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026, sehingga terdapat keselarasan antar dokumen perencanaan perangkat daerah.

Rancangan awal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 ini menjadi pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat. Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dalam Renstra serta memperhatikan skala Prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Rancangan awal Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi